

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ade Manan Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- A. Latief Fariqun, **Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumberdaya Alam dalam Politik Hukum Nasional**, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2007.
- A. Mukthie Fadjar. **Teori-teori hukum kontemporer**. Malang: Setara Press, 2013.
- A.P. Parlindungan. *Hak Pengelolaan Menurut UUPA*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Arief Sidharta. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Bernard Arief Shidata. *Mauwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2007.
- Boedi Harsono. **Undnag-Undang Pokok Agraria**. Jakarta: Djambatan, 1970.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelasanaannva*. Jakarta: Djambatan, 1997.
- Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok Pokok Filsafat Hukum-Apakah dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- H. McCoubrey and Nigel D. White. Textbook on Jurisprudence*. London: Blackstone Press Limited, 1996
- Ida Nurlida. **Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Imam Soetiknjo. *Politik Agraria Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Joeniarto. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Johnny Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia, 2006.
- Jum Anggraeni, **Hukum Administrasi**. Yogyakarta: Negara, Graha Ilmu, 2012.

Khudzaifah Dimiyati. *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Kusumadi Pudjosojuwojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. *Dasar Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Moh. Machfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.

Mudjiono. *Politik dan Hukum Agraria*. Yogyakarta: Liberty, 1997.

Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Philipus M Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu. 2008.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

Sri Hayati, *Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Investasi*. Surabaya: Disertasi, Universitas Airlangga.

Supriyadi. *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1982.

Undang-Undang:

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960; Tambahan Lembaran Negara 2043).

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah Negara.

Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dan Pembatalan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18).